

BAB V

KESIMPULAN

Pemikiran yang menjadi dasar berdirinya Hizbut Tahrir yakni pemikiran Islam. Pemikiran itu meliputi akidah Islam, pemikiran yang dibangun di atasnya, serta hukum-hukum yang terpancar dari-Nya. Hizbut Tahrir tidak cukup menjalankan pemikiran Islam yang bersifat umum (global). Namun Hizbut Tahrir mengadopsi sejumlah pemikiran yang diperlukan dalam aktivitas *isti'naf al-hayah al-Islamiyah* (mengembalikan kehidupan yang Islami), serta mengemban dakwah Islam dengan mendirikan Negara Khilafah.

Hizbut Tahrir memiliki tiga tujuan utama yakni; mengembalikan kehidupan yang Islami; mengemban dakwah Islam keseluruh dunia; dan membangun masyarakat dia atas Islam. Artinya, Hizbut Tahrir bertujuan mengembalikan kaum muslim kedalam kehidupan Islam di dalam Dar al-Islam dan masyarakat Islam, dimana seluruh urusan kehidupan didalamnya dijalankan sesuai dengan hukum-hukum syara', dan pandangan hidup (*way of live*) yang berlaku adalah halal haram, dibawah naungan Negara Islam, yaitu Ngara Khlifah.

Sedangkan PT Freeport Indonesia ini adalah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. PTFI ini memiliki dasar pemikiran yang berbeda dengan HTI, dimana dasar pemikiran tersebut berasal dari pemikiran Liberal yang mengutamakan kebebasan individu. Dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo, mereka menentang pengendalian ekonomi domestik dan internasional yang berlebihan. Perspektif ini mengajukan argumen bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah dengan membiarkan pertukaran individu secara domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak perlu adanya batasan. Liberal juga berasumsi bahwa individu (yaitu konsumen, perusahaan atau wiraswasta individual) adalah aktor utama yang berperilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan. Perspektif ekonomi politik Liberal dapat dirangkum dalam beberapa bagian sebagai berikut;

Individu secara rasional memaksimalkan perolehan, memiliki tujuan untuk memaksimalisasi kesejahteraan global, peran Negara adalah sekunder, terbatas sebagai penjamin pasar, kemudian dalam hubungan antara ekonomi politik maka, ekonomilah yang seharusnya menentukan politik.

Dimana Freeport-McMoRan (FCX) merupakan perusahaan tambang internasional utama dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Freeport-McMoRan merupakan perusahaan publik di bidang tambang yang terbesar di dunia, penghasil utama di dunia dari molybdenum – logam yang digunakan pada campuran logam baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi pelumas – serta produsen besar emas.

Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport dan Indonesia awalnya dimulai dari rezim orde baru. Meskipun dapat dikatakan bahwa rezim orde baru ini mendukung upaya investasi PTFI di Papua yakni dengan cara melahirkan dua Undang-Undang yaitu, Undang Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, lahirlah Kontrak Karya (KK) I dengan rezim militer orde baru yang dilaksanakan pada 5 April 1967 dan berlaku selama 30 tahun, terhitung sejak dimulainya aktifitas eksplorasi pada bulan Desember 1967. Kemudian dilanjutkan dengan perubahan Kontrak Karya I menjadi Kontrak Karya II yang dimana didalam KK II yang ditetapkan pada tahun 1991 dimana atas kebijakan tersebut PT Freeport memiliki otoritas untuk menambang dan beroperasi hingga 30 tahun kedepan setelah KK tersebut disetujui.

Banyak kelompok masyarakat yang mengkritik ataupun menolak Kontrak-Karya tersebut. Seperti halnya Hizbut Tahrir Indonesia yakni tentang pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan asing yang berlandaskan ideologi Liberal, dan kritiknya terhadap pemerintah tentang kebijakan-kebijakan atas beroperasinya perusahaan asing tersebut. Seperti kritiknya terhadap Undang-

Undang Mineral dan Batubara (UU-Minerba) juga kaitannya dengan berbagai kritiknya terhadap subsidi bahan bakar minyak.

Meskipun sumber-sumber ekonomi primer menurut berbagai Negara baik Negara yang berlandaskan sistem Liberal ataupun Islam, maka sumber-sumber ekonomi tersebut berasal dari; pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Maka yang menjadi penting dalam pembahasan kasus PT Freeport ini adalah sumber ekonomi dalam perindustrian. Diantara asas-asas kehidupan ekonomi yang paling penting bagi umat juga masyarakat manapun adalah industri. Dalam pandangan HTI yang menjadi sebab mengapa menolak berporeasinya PT Freeport ini karena Negara merupakan aktor primer dalam menjamin kesejahteraan individu. Sedangkan ekonomi politik Liberal melihat bahwa individu ataupun swasta merupakan aktor primer yang dapat mengatur politik.

Menurut pandangan HTI ini juga diamana salah satu pilar ekonomi Islam yakni membahas tentang adanya kepemilikan yang erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam. Kepemilikan ini, dibagi dalam tiga bagian salah satunya adalah kepemilikan umum yang didalamnya termasuk tambang yang tidak terbatas seperti halnya emas, perak, besi, tembaga, timah, aluminium dan sebagainya. Sama halnya dengan pandangan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap kekayaan alam tersebut baik dalam pengelolaan dan juga basis kepemilikannya tidak dapat diserahkan kepada kaum Kapitalisme-Liberal (Barat) yang dapat memicu berbagai masalah yang multidimensional. Masalah yang multidimensional ini terkait dengan tidak sesuainya norma yang berlaku dalam syari'at Islam dan juga terkait dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan PT Freeport di wilayah Papua tersebut. Lemahnya hukum yang tidak banyak mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam yang baik dan teratur, juga ketidak tundukan perusahaan terhadap hukum-hukum yang berlaku bagi perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia. Hal-hal inilah yang menjadi sebab-sebab mengapa Hizbut Tahrir Indonesia melakukan

desakan kepada pemerintah untuk menolak perpanjangan Kontrak-Karya dengan PT Freeport, yang jika perpanjangan tetap dilakukan maka akan dilakukan perpanjangan hingga tahun 2041 yang dimana bagi kelompok HTI ini akan terus menjadikan keberlangsungan Bangsa Barat dalam hegemoni kekuasaan di Negara Berkembang, terutama Indonesia yang memiliki penduduk bermayoritas Islam.